



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Sungai Moutong No. 8 Palu
Email : info@bawaslusulteng.com
Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

SIARAN PERS

Kemendagri di Harapkan Fasilitasi NPHD Bawaslu Sulteng

Palu, Bawaslu Sulteng – Bawaslu Sulteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan kedua terkait dengan dana hibah untuk Pilkada tahun 2020, Sabtu (9/11/2019). Dalam pembahasan tersebut, Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Mulyono mengungkapkan, Gubernur Sulawesi Tengah telah memberikan arahan untuk dana hibah pengawasan Pilkada yang dapat diajukan sebesar 55 miliar.

Hasil pembahasan pertama atas permohonan anggaran Pilkada tahun 2020 untuk NPHD Bawaslu Sulteng yang digelar Rabu, 6 November lalu menghasilkan angka sementara sebesar 77,2 milyar. Atas angka tersebut, setelah dilakukan pencermatan internal di Bawaslu Sulteng menghasilkan angka pengajuan sebesar 69,9 milyar untuk dibahas dalam rapat pembahasan kedua.

Namun menanggapi hal tersebut, Bawaslu Sulteng akan melaporkan hasil pembahasan tersebut ke Bawaslu RI dan akan menyampaikan hasilnya kepada TAPD pada hari Senin, 11 November 2019. Jika tidak mencapai kesepakatan, pembahasan ini selanjutnya akan di bahas bersama dengan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk menemui titik terang.

Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengungkapkan Pembahasan NPHD Bawaslu Sulteng rencananya akan dilanjutkan dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, hal itu karena tidak ada titik temu antara anggaran yang di ajukan Bawaslu Sulteng berjumlah 69,9 milyar dengan keinginan pemerintah daerah yang mematok anggaran 55 milyar.

“Fasilitasi anggaran berikutnya bisa jadi akan difasilitasi oleh kementerian dalam negeri akibat tidak ada titik temu antara pemerintah daerah ataupun TAPD dengan Bawaslu Sulteng untuk pembiayaan Pilkada tahun 2020”. Jelasnya

Sebelumnya, delapan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulteng telah mencapai kesepakatan dan penandatanganan NPHD, yakni Bawaslu Sigi 9 miliar. Bawaslu Touna 8,7 miliar. Bawaslu Toli-toli 8.5 miliar. Bawaslu Banggai 15.8 miliar. Bawaslu Banggai Laut 10 miliar. Bawaslu Morowali Utara 10 miliar. Bawaslu Palu 8 miliar, dan Kabupaten Poso 12,2 miliar.

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter [@bawaslu_sulteng](https://twitter.com/bawaslu_sulteng), Instagram: [bawaslu.sulteng](https://www.instagram.com/bawaslu.sulteng), Fanpage Facebook: [Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah](https://www.facebook.com/BawasluProvinsiSulawesiTengah). Berkas dapat diunduh di website resmi : sulteng.bawaslu.go.id.